

STUDI LITERATUR: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Dede Mardiah¹, Fira Putri Renggani², Nur Santi Paujiah³, Lani Mulyawati⁴, Siti Resa Nurjanah⁵, Denny Hernawan^{6*}, Afmi Apriliani⁷.

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor. Jl. Tol Ciawi No.1 Kode Pos 16720

*Korespondensi: denny.hernawan@unida.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas implementasi Program Kartu Prakerja sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pasca-pandemi COVID-19. Dikenalkan pada Februari 2020, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan mendorong peserta untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan persyaratan industri. Meskipun terdapat laporan peningkatan keterampilan di kalangan peserta, tantangan signifikan tetap ada, termasuk kualitas pelatihan yang tidak selalu sesuai harapan dan relevansi keterampilan yang diajarkan. Penelitian ini menganalisis berbagai sumber yang dapat dipercaya menggunakan metodologi tinjauan Pustaka (studi literatur) dan mengevaluasi dampak program terhadap pengangguran. Hasil menunjukkan bahwa meskipun Program Kartu Prakerja memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterampilan SDM, namun efektivitasnya masih terhambat oleh komunikasi antar organisasi yang kurang optimal dan tujuan kebijakan yang belum sepenuhnya berhasil. Semoga artikel ini dapat memberikan pengetahuan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pengangguran, PHK, Program kartu prakerja

PENDAHULUAN

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan

peningkatan kemampuan, termasuk bisnis kecil dan mikro (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait pengangguran dan PHK. (pemutusan hubungan kerja). Jumlah orang yang menganggur telah meningkat secara signifikan, terutama akibat pandemi COVID-19 yang telah mengganggu berbagai sektor ekonomi, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). (Kompasiana, 2024). Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka, sehingga menciptakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang ada. Dalam konteks ini, Program Kartu Prakerja diperkenalkan sebagai upaya strategis pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak (Prabowo, 2020)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja disahkan pada Februari 2020. Peraturan ini memberikan kerangka hukum dasar bagi program tersebut. (Peraturan Presiden RI, 2020), (Dandy Rafitrandi, 2022). Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan keterampilan yang ada di pasar kerja, di mana banyak pencari kerja tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri sekarang ini. Melalui pelatihan yang ditawarkan, diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi mereka dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.

Meskipun Program Kartu Prakerja memiliki tujuan yang baik, implementasinya tidak tanpa tantangan (Sari, 2021). Banyak kritik muncul terkait kualitas pelatihan yang disediakan seperti terjadi pada beberapa penerima manfaat melaporkan pelatihan yang mereka terima tidak memuaskan atau tidak relevan dengan kebutuhan industri dalam bidang tertentu (Prisca Triferia Violleta, 2020). Selain itu, peserta program kartu prakerja tidak sepenuhnya mengikuti pelatihan hingga akhir, sehingga keberhasilan program kartu prakerja tidak sepenuhnya mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Serta pemerintah harus

dapat meluruskan bahwa program kartu prakerja bertujuan untuk memberikan insentif bagi modal pelatihan daripada memberikan bantuan tunai kepada pengangguran. Jangan sampai orang berpikir bahwa program ini merupakan bantuan tunai langsung. (Prisca Triferma Violleta, 2020).

Dari perspektif kebijakan publik, penting untuk menilai pengaruh Program Kartu Prakerja terhadap angka pengangguran serta PHK. Berbagai studi menunjukkan bahwa program ini telah memberikan manfaat bagi sebagian peserta, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa dampaknya belum maksimal (Nuraini, 2022). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk memahami keberhasilan Implementasi kebijakan program Kartu Prakerja ini serta tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian literatur. (Sugiyono, 2013) yang bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kebijakan program Kartu Prakerja diterapkan dalam mengatasi masalah pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber terpercaya, seperti artikel dari Google Scholar, laporan pemerintah dari website resmi, serta artikel berita dari laman media massa. Kata kunci yang digunakan dalam mencari literatur adalah, Implementasi kebijakan, pengangguran, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan Program kartu prakerja. Dari kata kunci tersebut kami menemukan sejumlah 50 artikel yang sesuai dengan topik yang kami ambil dan hanya 27 artikel saja yang kami gunakan sebagai sumber atau referensi dari pembuatan artikel ini yang didasarkan pada seleksi yang kami lakukan dilihat dari kesesuaian hasil dan pembahasan pada topik bahasan Program Kartu Prakerja ini. Analisis ini mencakup tinjauan implementasi program dalam menanggulangi pengangguran dan PHK, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang

sistematis, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan implikasi kebijakan secara jelas. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini memberikan pembaca informasi yang bermanfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM di tengah tantangan pasar kerja yang terus berkembang. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelatihan yang relevan, tetapi juga untuk menciptakan peluang bagi masyarakat dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja (Budi, 2021). Dengan memberikan insentif berupa bantuan finansial, peserta program kartu pra kerja didorong untuk aktif mengikuti pelatihan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi mereka. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tentunya dapat diukur melalui beberapa variabel seperti hal nya yang yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan serta komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana (UIN Suska Riau, n.d.).

- Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hasil dan Temuan diperoleh dari beberapa artikel yang relavan dengan pembahasan implementasi kebijakan program kartu prakerja dalam mengatasi masalah pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tabel 1.

No	Nama Penulis	Hasil dan Temuan
1	Manurung, M. S. (2020)	Evaluasi menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja efektif dalam meningkatkan kompetensi SDM, akan tetapi terdapat indikator keberhasilan yang kurang tercapai secara optimal.

2	Putri, F. (2023)	Mengidentifikasi tantangan implementasi Kartu Prakerja di daerah pedesaan, termasuk akses dan infrastruktur.
3	Rahmawati, I. (2021)	Evaluasi efektivitas dan kualitas pelatihan menunjukkan perlunya perbaikan dalam penyampaian materi.
4	Santoso, T. (2021)	Analisis keterampilan pasca pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan di kalangan peserta Kartu Prakerja.
5	Hidayah, N. (2022)	Menilai kualitas pelatihan dalam Kartu Prakerja, menunjukkan bahwa peserta menginginkan peningkatan dalam materi pelatihan.
6	Elena, M. (2021)	Survei CSIS menemukan bahwa 42,4% peserta menggunakan insentif Kartu Prakerja untuk modal usaha, menyoroti dampak positif bagi kewirausahaan.
7	Anwar, M. (2022)	Keterkaitan antara insentif Kartu Prakerja dan peningkatan pendapatan peserta menunjukkan hasil yang tidak sesuai dalam penggunaannya.
8	Agustina, D. (2022)	Menggali harapan dan realita Kartu Prakerja, menunjukkan perbedaan antara ekspektasi dan hasil.

Berdasarkan hasil dan temuan dalam tabel 1, Dalam hal ukuran dan tujuan kebijakan, keberhasilan program Kartu Prakerja dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu seperti efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kemampuan SDM, relevansi keterampilan yang diperoleh dengan kebutuhan pasar kerja, dan dampak insentif pasca pelatihan terhadap peningkatan pendapatan.

Efektivitas pelatihan dapat diukur melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan peserta setelah mengikuti program. Berdasarkan data yang ada 96,1% peserta (Indonesia, 2022) melaporkan peningkatan kemampuan dalam bidang yang mereka pilih, yang menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan peserta hampir seluruh peserta mengikuti pelatihan hingga akhir. Akan tetapi penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebanyak 35% peserta (Manurung, 2020) program kartu prakerja tidak dapat menyelesaikan pelatihan yang telah mereka pilih, hal ini dikarenakan kurangnya motivasi peserta dalam mengikuti pelatihan serta kurangnya akses internet yang memadai khususnya di daerah-daerah pedesaan (Putri, 2023). Oleh karena itu program ini belum bisa sepenuhnya dikatakan efektif dan berhasil dalam meningkatkan keterampilan peserta.

Relevansi keterampilan yang diperoleh peserta pelatihan juga merupakan indikator penting dalam keberhasilan program ini. Pelatihan yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan nyata di pasar kerja, sehingga lulusan pelatihan dapat dengan mudah beradaptasi dan diterima di dunia kerja (Rahmawati, 2021). Meskipun program ini menawarkan berbagai jenis pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta, tidak semua keterampilan yang diajarkan sesuai dengan tuntutan di lapangan. Banyak pelatihan lebih fokus pada keterampilan dasar (Santoso, 2021), sementara pasar kerja saat ini mencari keterampilan yang lebih spesifik dan relevan, terutama dalam bidang teknologi dan digital (Yulianti, 2023). Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara apa yang dipelajari peserta dan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi peluang peserta untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai (Hidayah, 2022). Program kartu pra kerja mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan/program belum tercapai dengan optimal, yaitu dimana para peserta dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.

Dari segi ekonomi, dampak insentif yang diberikan kepada peserta pasca pelatihan juga menjadi indikator keberhasilan yang signifikan. Program Kartu Prakerja dirancang untuk memberikan insentif keuangan kepada peserta. Tujuan utama dari insentif ini adalah untuk mendukung peserta dalam mengikuti pelatihan, dengan harapan mereka dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar kerja. Namun, hasil survei yang dilakukan oleh Peneliti Senior CSIS Indonesia Fajar B. Hirawan (Elena, 2021) menyatakan bahwa insentif yang diberikan pasca pelatihan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi peserta. Sebagian besar peserta cenderung menggunakan dana insentif tersebut untuk biaya hidup sehari-hari, seperti membeli makanan, membayar tagihan, atau kebutuhan mendesak lainnya, alih-alih untuk meningkatkan keterampilan mereka lebih lanjut (Anwar, 2022).

Secara keseluruhan, dalam semua indikator menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja tidak terealisasi dengan optimal, seperti efektivitas pelatihan, relevansi keterampilan yang diperoleh, dan insentif yang digunakan oleh peserta menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya (Agustina, 2022). Dengan mempertimbangkan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn (Riau, 2016), terdapat tantangan dalam variabel ukuran dan tujuan kebijakan yang belum sepenuhnya tercapai. Beberapa peserta masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan keterampilan yang diperoleh di dunia kerja, dan dampak insentif terhadap peningkatan pendapatan belum merata di seluruh lapisan masyarakat (Astuti, 2023). Oleh karena itu, meskipun terdapat harapan untuk pengembangan SDM yang lebih baik di Indonesia, keberhasilan program ini masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih efektif dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas.

- Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Hasil dan Temuan diperoleh dari beberapa artikel yang relevan dengan pembahasan implementasi kebijakan program kartu prakerja dalam mengatasi masalah pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tabel 2.

No	Nama Penulis	Hasil dan Temuan
1	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2024)	Menyampaikan potensi Kartu Prakerja dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia, serta pentingnya adaptasi terhadap perubahan ekonomi.
2	Setiawan, B. (2022)	Menyoroti peran pemerintah dalam implementasi Kartu Prakerja dan tantangan yang dihadapi.
3	Agustina, D. (2022)	Menggali harapan dan realita Kartu Prakerja, menunjukkan perbedaan antara ekspektasi dan hasil.
4	Prisca Triferna Violleta (2020)	Menyajikan harapan dan kritik pengguna terkait Kartu Prakerja, menekankan perlunya perbaikan dalam penyampaian pelatihan.
5	Sabrina, dkk. (2021)	Catatan kritis menunjukkan bahwa implementasi Kartu Prakerja di masa pandemi menghadapi tantangan signifikan, termasuk aksesibilitas dan relevansi pelatihan.
6	Badan Keahlian DPR RI (2021)	Mengidentifikasi masalah akuntabilitas keuangan negara di masa pandemi, yang juga berdampak pada program Kartu Prakerja.

Berdasarkan hasil dan temuan dalam tabel 2, enurut Van Meter dan Vam Horn dalam (UIN Suska Riau, n.d.), Salah satu mekanisme penting yang

menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah komunikasi dan aktivitas pelaksana organisasi. Kesalahan akan sangat kecil jika semua pihak yang terlibat dalam implementasi bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, dan sebaliknya.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi kebijakan program Kartu Prakerja di Indonesia melibatkan koordinasi atau kerja sama yang kompleks antara berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan program. Koordinasi ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan (Setiawan, 2022). Dengan begitu, forum koordinasi secara berkala diadakan untuk membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Kemudian sosialisasi program Kartu Prakerja itu sendiri dilakukan melalui kampanye informasi di media sosial, website resmi, dan penyuluhan langsung untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara pendaftaran Kartu Prakerja. Namun, realita dilapangan menunjukkan bahwa calon peserta yang akan mendaftarkan dirinya pada program Kartu Prakerja mengalami kesulitan atau hambatan yaitu salah satunya mekanisme pendaftaran data diri pada laman resmi Kartu prakerja yang tidak bisa memuat halaman selanjutnya, sehingga peserta yang berniat ingin mendaftar prakerja berubah pikiran karena hambatan tersebut (Agustina, 2022). Hal ini menjadi masalah yang serius bagi pemerintah serta pihak-pihak terkait dalam memperbaiki sistem pendaftaran pada laman kartu prakerja Selain itu, pelatihan dan webinar diadakan bagi penyuluh dan pelaksana untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat. Monitoring dan evaluasi program dilakukan melalui sistem pelaporan berkala yang mencakup *feedback* dari peserta. Evaluasi berkala juga

seringkali dilakukan untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Kemitraan dengan sektor swasta juga menjadi bagian penting dari implementasi program (Prisca Triferina Violleta, 2022), dengan kolaborasi bersama platform pembelajaran *online* untuk menyediakan kursus yang dapat diakses oleh peserta. Selain dari itu, dukungan dari dunia usaha juga didorong untuk berpartisipasi dalam menciptakan peluang kerja bagi lulusan program. Teknologi juga dimanfaatkan melalui pengembangan aplikasi dan website untuk pendaftaran dan pengawasan program, serta pemanfaatan data *analytics* untuk analisis kebutuhan pelatihan dan penyesuaian program berdasarkan tren pasar.

Namun, implementasi program Kartu Prakerja juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk masalah pendataan masyarakat yang ditargetkan, kualitas pelatihan yang diberikan, dan potensi penyelewengan anggaran (Sabrina, 2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BKP), dan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit dengan KPPU untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan program sebelumnya dan perbaikan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja ini (Badan Keahlian DPR RI, 2021). Evaluasi yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan program ini benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Dengan komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antar organisasi serta aktivitas pelaksana, program Kartu Prakerja diharapkan dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi Program Kartu Prakerja di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin meningkat, terutama pasca COVID-19. Program

ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, serta memberikan insentif finansial bagi peserta untuk mengikuti pelatihan yang relevan. Meskipun beberapa peserta melaporkan peningkatan keterampilan, terdapat tantangan signifikan terkait kualitas pelatihan, relevansi keterampilan yang diajarkan, serta pemanfaatan insentif yang kurang efektif. Data menunjukkan bahwa ketidakelesaian pelatihan dan kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan pasar menyebabkan program ini belum sepenuhnya mencapai tujuannya.

Selain itu, keberhasilan implementasi Program Kartu Prakerja sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Meskipun terdapat upaya kolaborasi yang baik, tantangan seperti pendataan masyarakat yang tidak akurat dan potensi penyelewengan anggaran tetap harus diatasi. Evaluasi yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk memastikan program ini menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan perbaikan di berbagai aspek tersebut, diharapkan Program Kartu Prakerja dapat lebih efektif dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi dunia kerja yang terus berubah.

REFERENSI

- Badan Keahlian DPR RI. (2021). *Dinamika Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara Di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Pengelolaan Kartu Prakerja* .
- Dandy Rafitrandi. (2022, November 13). *Program Kartu Prakerja: Tantangan Implementasi di Masa Pandemi COVID-19 dan Sesudahnya*. CSIS Indonesia.
- Elena, M. (2021). *Survei CSIS : 42,4 Persen Peserta Kartu Prakerja Pakai Insentif untuk Modal Usaha*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com>.
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2022). *Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja*. Prakerja. <https://laporan-2022.prakerja.go.id/>

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Gali potensi dirimu dengan Kartu Prakerja*. Prakerja.
- Kompasiana. (2024, October 6). *Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia: Pemulihan dan Transformasi*. Kompasiana Beyond Blogging.
- Manurung, M. S. (2020). *Evaluasi Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Meningkatkan Kompetensi SDM*. 1–11.
- Prisca Triferna Violleta. (2020, May 23). *Asa dan kritik pengguna untuk Kartu Prakerja*. ANTARA, Kantor Berita Indonesia.
- Prisca Triferna Violleta. (2022, February 9). *Direktur PMO: Penting kolaborasi dengan swasta untuk Kartu Prakerja*. ANTARA, Kantor Berita Indonesia.
- Riau, uin S. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN. In *Implementasi Kebijakan*.
- Sabrina, dkk. (2021). *Catatan Kritis Implementasi Program Kartu Prakerja di Masa Pandemi Covid-19*.
- Agustina, D. (2022). *Kartu Prakerja: Antara Harapan dan Realita*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*.
- Anwar, M. (2022). *Keterkaitan Antara Insentif Program Kartu Prakerja dan Peningkatan Pendapatan Peserta*. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Astuti, S. (2023). *Evaluasi Program Kartu Prakerja di Masa Pandemi*. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*.
- Budi, H. (2021). *Analisis Implementasi Program Kartu Prakerja di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
- Hidayah, N. (2022). *Kualitas Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja: Tinjauan dari Peserta*. *Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*.
- Nuraini, A. (2022). *Evaluasi Program Kartu Prakerja dan Dampaknya terhadap Pekerja yang Terkena PHK*. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Peraturan Presiden RI. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja*. In *Peraturan Presiden RI*.
- Prabowo, A. (2020). *Dampak Program Kartu Prakerja Terhadap Pengangguran di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.

- Putri, F. (2023). Tantangan Implementasi Kartu Prakerja di Daerah Pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rahmawati, I. (2021). Kartu Prakerja: Efektivitas dan Kualitas Pelatihan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembangunan*.
- Santoso, T. (2021). Analisis Keterampilan Pasca Pelatihan Kartu Prakerja. *Jurnal Ekonomi*.
- Sari, D. (2021). Kartu Prakerja: Solusi atau Tantangan bagi Tenaga Kerja Indonesia? *Jurnal Sosiologi*.
- Setiawan, B. (2022). Peran Pemerintah dalam Implementasi Kartu Prakerja. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- UIN Suska Riau. (n.d.). *Landasan Teori*.
- Yulianti, R. (2023). Peran Kartu Prakerja dalam Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja di Era Digital. *Jurnal Manajemen*.